

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG
JASA KONSTRUKSI TERHADAP PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
YANG WANPRESTASI JADWAL WAKTU KONTRAK
(Studi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo)**

TESIS

*Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum*

Minat Utama : Hukum dan Kebijakan Publik



OLEH:

ANWAR SADAT

NIM : S.310208203

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

2010

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG
JASA KONSTRUKSI TERHADAP PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
YANG WANPRESTASI JADWAL WAKTU KONTRAK
(Studi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo)**



Disusun Oleh :

ANWAR SADAT

NIM : S.310208203

Telah disetujui Oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum</u>	
	NIP.19570203 198503 2 001		
2. Pembimbing II	<u>Rehnalemken Ginting, SH., M.H</u>	
	NIP.19580105 198403 1 001		

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S

NIP. 19440505 196902 1 001









**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG
JASA KONSTRUKSI TERHADAP PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
YANG WANPRESTASI JADWAL WAKTU KONTRAK
(Studi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo)**

Disusun Oleh :

ANWAR SADAT

NIM : S.310208203

Telah Disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Setiono, SH, M.S. NIP. 194405051969021001	
Sekretaris	Dr. I Gusti Ayu Ketut RH., SH, MM NIP. 197210082005021001	
Anggota Penguji	Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum NIP. 195702031985032001	
	R. Ginting, SH, MH NIP. 195801051984031001	
Mengetahui Studi Ilmu Hukum	Prof. Dr. Setiono, SH, M.S. NIP. 19440505 196902 1 001	
Direktur Program Pascasarjana	Prof. Dr. Suranto, M.Sc. PhD. NIP. 19570820 198503 1 004	



PERNYATAAN

Nama : Anwar Sadat

NIM : S.310208203

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul ***“Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi terhadap Pelaksana Jasa Konstruksi Yang Wanprestasi Jadwal Waktu Kontrak (Studi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo)”***, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Januari 2010
Yang Membuat Pernyataan,


Anwar Sadat

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir RaHiim

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum (S2) Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik pada Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Adapun tesis ini berjudul : **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP PELAKSANA JASA KONSTRUKSI YANG WANPRESTASI JADWAL WAKTU KONTRAK (Studi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo)”**.

Sangat disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu diharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan tesis ini. Dalam kesempatan ini tak lupa diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr. Sp. KJ (K), selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Suranto, M.Sc.,PhD, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Moh. Jamin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk kuliah pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penelitian tesis dan juga sebagai tim penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, MH, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus

- dosen Pembimbing I yang telah banyak mencurahkan perhatiannya demi selesainya penulisan tesis ini.
6. Bapak R. Ginting, SH, MH, selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
 7. Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
 8. Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Prov. Gorontalo yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
 9. Kedua orang tuaku yang tercinta, istri serta anak-anakku yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 10. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya yang dari Kab. Pohuwato dan Prov. Gorontalo yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian studi.
 11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung selama melaksanakan studi
- Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan akan memperoleh pahala yang setimpal dari Yang Maha Kuasa, Amin...

Surakarta, Januari 2010

Anwar Sadat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Efektivitas Hukum	8

B.	Teori Tentang Ganti Rugi Karena Wanprestasi	10
	1. Konsep Kerugian Dalam Hukum Kontrak.....	11
C.	Pengertian Pelaksana Jasa Konstruksi.....	14
D.	Pengikatan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan Kedudukannya Dalam Hukum Perjanjian	19
E.	Wanprestasi Jadwal Waktu Kontrak dan Dasar Hukum Penerapan Sanksi Denda	30
F.	Penerapan Sanksi Denda Akibat Wanprestasi Terhadap Jadwal waktu Kontrak Dalam Praktek	38
G.	Kerangka Pikir	43
BAB III. OBYEK DAN METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Lokasi Penelitian.....	48
C.	Populasi dan Sampel	48
	a. Populasi	48
	b. Sampel.....	49
D.	Jenis dan Sumber Data	49
	a. Data Primer	49
	b. Data Sekunder.....	49
E.	Teknik Pengumpulan Data	50
F.	Validitas Data.....	50

G.	Teknik Analisa Data	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B.	Pembahasan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Investasi Pemerintah	54
1.	Investasi Hukum Positif	54
2.	Tahap Sinkronisasi Hukum Positif	55
1.	Sinkronisasi Vertikal	55
2.	Sinkronisasi Horizontal	62
C.	Deskripsi Penerapan Sanksi Denda pada Pelaksana Jasa Kontruksi yang Wanprestasi Jadwal Waktu Kontrak di Kabupaten Pohuwato	65
D.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Denfa Terhadap Pelaksana Jasa Kontruksi yang Wanprestasi Jadwal Waktu Kontrak	76
BAB V. PENUTUP		
A.	Kesimpulan	82
B.	Implikasi	83
C.	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jumlah Pelaksana Jasa Konstruksi dan kualifikasi di Kab. Pohuwato Tahun 2007 – 2008	53
Tabel 2	Rekapitulasi Temuan Lembar Hasil Pemeriksaan BPKP terhadap Pelaksana Jasa Konstruksi yang Wanprestasi Jadwal Kontrak Dalam Pemborongan Proyek Pemerintah Mulai Tahun 2004 – 2008	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram pemenuhan Prestasi/ Wanprestasi dalam kontrak	32
Gambar 2	Diagram Kerangka Pikir	45
Gambar 3	Diagram Teknik Analisis Data	50



ABSTRAK

Anwar Sadat Nim : S310208203, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 terhadap Pelaksana Jasa Konstruksi Yang Wanprestasi Jadwal Waktu Kontrak (Studi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya sanksi denda menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 terhadap Pelaksana Jasa Konstruksi yang wanprestasi jadwal waktu kontrak di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil ini diharapkan memberi kontribusi bagi Pemerintah, penyedia dan pengguna Jasa Konstruksi dan masyarakat luas pada umumnya sekaligus sebagai upaya untuk mencari solusi yang benar, baik dan tepat dalam penyelesaian masalah penerapan sanksi denda terhadap pelaksana jasa konstruksi yang wanprestasi jadwal waktu kontrak, (khusus terhadap proyek pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah) di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo khususnya dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Selain itu juga sebagai bahan hukum dalam pengembangan ilmu bidang hukum dan kebijakan publik.

Data diperoleh dengan cara mengamati secara langsung, wawancara, pada responden yaitu pelaksana jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi/PPK/PPTK, Gapensi, LPJK, dan BPKP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sanksi denda tersebut tidak efektif, ini didukung oleh data yang melanggar sanksi denda pada kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) terdapat 13 (tiga belas) perusahaan Jasa Konstruksi dan cenderung memilih cara non legitasi dalam penyelesaiannya bahkan ada juga yang belum melakukan pembayaran sama sekali.

Faktor yang mempengaruhi secara bersama-sama adalah faktor substansi, struktur, kultur, kesadaran hukum, sikap pengawas fungsional, sikap pelaksana Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi.

Agar masyarakat Jasa Konstruksi tidak berbeda pendapat mengenai kalimat “Sanksi Denda” dengan kalimat “Ganti Rugi” maka diharapkan pemerintah untuk segera meninjau kembali substansi undang-undang nomor 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah serta petunjuk teknisnya agar dapat disikapi sama dan selanjutnya ditaati oleh pelaksana Jasa Konstruksi dengan nilai kesadaran internalization.

ABSTRACT

Anwar Sadat Nim : S310208203, "The Effectiveness of Implementation of Penalty According to UU No. 1999s to The Services Contractor Who has Breach of Contract, Specially on The Time Schedule of That One (A study in Pohuwato, Gorontalo)".

The objective of the research is to know either effective or ineffective of the penalty implementation according to UU No. 18 1999s to the Service Contractors who have breach of contract, specially on the time schedule of that one (A Study in Pohuwato, Gorontalo) and also to know the influencing factors in it.

The result of this research is supposed to contribute to the government, contractors, users and general to all people. This is one of effort to look for brilliant problem solving of penalty implementation to service contractor who have breach of contract, specially on the time schedule of that one, (the supplement projects of goods and services of the government, including the buildings of government) in Pohuwato, Gorontalo.

The data taken by observation, interview, and questioner to respondents. They are including service contractors, users, PIMPRO, GAPENSI, LPJK, and BPKP.

The result or research shows the implementation of penalty is not effective. It is supported by the empirical data; the contractor who has breach of contract in 2003 to 2008 (for six years) has been implemented to the 13 contractors. They only gave compensation 8%. It means that 92% has not given it yet. Based on the analysis of submissiveness, one who has submissiveness is only 10%, less of that one is 27% and totally disubmissiveness is 63%.

The influencing factors are including substantial, structural, cultural and lawful awareness, attitude of supervisor of BPKP, the attitude of service contractors, and the users factor.

To avoid misconception about the term "Sanksi Denda" with "Ganti Rugi", the government have to review UU No. 18 1999s and PP (The Role of Government) and also give the technical direction about that in order to avoid misconception, and finally to implement with the values of internalization.